

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk menyelaraskan layanan SKPD dengan lingkungan dan pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan eksternalnya tidak boleh diabaikan dalam proses perencanaan. Terkait dengan hal tersebut, maka identifikasi terhadap isu - isu yang tepat dan bersifat sangat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang mengemban amanat melaksanakannya.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Inspektorat dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi Inspektorat. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang.

3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota, Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Selain menjalankan fungsi di atas, Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang :

- a. Administrasi Umum, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ;
- b. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

TABEL 7
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
				Internal (Kewenangan Inspektorat)	External (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gambaran Pelayanan Inspektorat	Pelayanan Inspektorat belum optimal	Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru 2. Lemahnya penyusunan program anggaran 3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP; 4. Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan 5. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan sangat terbatas 2. Alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kurang memadai 3. Kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP 4. Kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya, 5. Mutasi pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya 2. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan 3. Belum optimalnya penyusunan program anggaran 4. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan 5.. Belum optimalnya implementasi SPIP 6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja 7. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya 8. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. 9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
				Internal (Kewenangan Inspektorat)	External (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
1	2	3	4	5	6	7
2	Kajian terhadap Renstra K/L	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	Tingkat kepatuhan terhadap aturan kurang	Belum tersusunnya SPI	Sering berubahnya aturan	1. Inspektorat belum berperan sebagai quality assurance 2. Kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya.
3	Kajian terhadap Renstra Inspektorat Propinsi/ Kab/Kota	Implementasi SPIP masih dalam proses	Peraturan Pemerintah No 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP	Koordinasi dengan SKPD lain belum optimal	Belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP
4	Kajian terhadap RTRW	Mojokerto Smart city dalam proses	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Perangkat teknologi kurang memadai	Ketersediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan belum memadai	Belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan
5	Kajian KLHS	Kualitas lingkungan menurun	Daya dukung Lingkungan meningkat	Tidak adanya SDM pengawasan yang kompeten	Daya dukung lingkungan terbatas	Norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis belum tersusun

Dari tabel di atas, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Gambaran Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Inspektorat saat ini, teridentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya;
- b. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan;
- c. Belum optimalnya penyusunan program anggaran;
- d. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan;
- e. Belum optimalnya implementasi SPIP;
- f. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja;

- g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- h. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; dan
- i. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.

Munculnya beberapa permasalahan di atas, dipengaruhi oleh faktor - faktor internal maupun eksternal. Faktor - faktor tersebut meliputi : kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru, ditambah dengan terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan, lemahnya penyusunan program anggaran, kurang memadainya alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Faktor berpengaruh lainnya adalah Satgas SPIP belum seluruhnya memahami SPIP, sedangkan dari faktor eksternal Inspektorat kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP, belum seluruh aparatur mengikuti diklat pengawasan, lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja, kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya serta adanya mutasi pegawai.

2. Aspek Kajian Renstra Inspektorat Propinsi

Berdasarkan kajian Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur, bahwa sasaran strategis meningkatnya sistem pengendalian internal kiranya patut dikedepankan, ditengah upaya Pemerintah Kota mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal ini. Dimana, permasalahan yang muncul dalam aspek ini adalah belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP. Sebagaimana diketahui, bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, prosesnya baru pada tahapan persiapan. Penerapan SPIP yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat SPIP. Sedangkan tahap pembuatan Grand Design SPIP,

pembuatan Infrastruktur SPIP, pelaksanaan Diagnostik Assesment/ Control Self Assessment dan evaluasi penerapan SPIP, hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Diperlukan pula koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar implementasi SPI ini dapat berjalan optimal.

3. *Aspek Kajian Renstra Kementerian*

Pada aspek kajian Renstra Kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, salah satu sasaran strategis yang hendak diwujudkan adalah meningkatnya kepatuhan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam implementasi aturan, yang dipandang masih kurang. Bertitik tolak dari kajian ini dapat diidentifikasi permasalahan Inspektorat, bahwa Inspektorat belum berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya. Adapun faktor internal yang mempengaruhi permasalahan Inspektorat adalah belum tersusunnya SPI dan sering berubahnya aturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. *Aspek Kajian terhadap RTRW*

Pada aspek kajian ini, hal yang cukup menonjol bagi Kota Mojokerto adalah pengembangan tata ruang kota sebagai "smart city" yang berbasis pada teknologi informasi. Sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dapat dikatakan sudah cukup memadai, tetapi belum dimanfaatkan oleh Inspektorat secara optimal, karena perangkat teknologi yang ada belum cukup memadai. Kedua faktor ini memunculkan permasalahan Inspektorat hingga saat ini belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.

5. *Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

Berdasarkan kajian ini, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Mojokerto, yaitu belum tersusunnya norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis. Sebagaimana diketahui dengan terbatasnya daya dukung sumber daya alam, maka penataan lingkungan akan menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota Mojokerto, tentunya juga bagi upaya pengendalian dan pengawasannya. Di sisi yang lain, Inspektorat

mengalami keterbatasan aparatur, khususnya yang memiliki basis kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, dari aspek kajian tersebut dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Inspektorat dari faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal. Beberapa isu strategis yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, regional/lokal dan lingkungan lainnya adalah indeks persepsi terhadap korupsi birokrasi di Indonesia yang masih berada pada ranking 110 dari 177 negara yang dilakukan riset oleh Transparency International. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi ini justru mengalami penurunan dibandingkan peringkat pada tahun 2012. Pada level nasional, isu yang menarik untuk dicermati adalah Kementerian Dalam Negeri telah mencatat hingga bulan Januari 2014, sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah atau 60,7 %, tersangkut dengan kasus korupsi yang sebagian besar diantaranya sudah ditahan. Pada tingkat lokal, munculnya masalah pengelolaan aset daerah pada akhir tahun 2013, tentunya patut menjadi perhatian yang serius, selain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN. Berikut disajikan tabel identifikasi isu - isu strategis lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto.

TABEL - 3.1
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

Isu Strategis				
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Indeks persepsi terhadap korupsi birokrasi Indonesia	Banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi	Munculnya masalah pengelolaan aset daerah	Tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto Bagian keenam Pasal 9 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektorat mempunyai kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong sebagai berikut :

TABEL - 8
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi :				
- Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang cerdas				
1. SDM yang berkualitas dan				
2. Pemerintah dan swasta yang professional dan berdaya saing tinggi				
- Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang bermoral				
1. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi I :</p> <p>Menyediakan produk, jasa layanannya yang maju dan berdaya saing tinggi</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Data/Informasi 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya 2. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan 3. Belum optimalnya penyusunan program anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru 2. Lemahnya penyusunan program anggaran 3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP 4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih 2. SDM yang kompeten dan Profesional 3. Peran Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Strategi pengawasan yang tepat

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 8. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya Pengawasan 9. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	4. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan 5. Belum optimalnya satgas SPIP 6. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja 7. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya 8. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan 9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/ bangunan.	5. Belum semua aparaturnya mengikuti diklat pengawasan 6. Kebijakan mutasi pegawai.	5. Perencanaan Pengawasan 6. Koordinasi dan sinergitas pengawasan

a. Faktor Penghambat

1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru
Kondisi peralatan kerja yang ada, seperti laptop dan PC kurang terpelihara dengan baik, jumlahnya juga tidak mencukupi untuk menunjang kinerja personil Inspektorat. Sedangkan pengadaan peralatan baru juga masih terbatas. Kondisi ini tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi Inspektorat untuk menyelesaikan tugas - tugas penyusunan laporan hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Lemahnya penyusunan program anggaran
Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Bahkan terdapat satu kegiatan, yang perencanaan anggarannya tidak mampu mencukupi kegiatan operasional rutin Inspektorat. Kondisi ini menjadi faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Oleh karena itu, proses pemahaman/*knowing* yang merupakan tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan menyamakan persepsi, agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP, menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SPIP. Dan sebaliknya, jika pemahaman Satgas SPIP belum terbangun, maka tentunya akan menjadi faktor penghambat yang serius bagi tercapainya tujuan SPIP.

4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja

Komunikasi berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan. Komunikasi juga bagian terpenting dalam upaya membangun persepsi aparat guna pelaksanaan tugasnya. Selain komunikasi, kerjasama antar unit kerja di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pengawasan, agar diperoleh hasil pemeriksaan yang lebih bersifat integral dan komprehensif. Lemahnya komunikasi dan kerjasama tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi tercapainya sasaran hasil pemeriksaan yang berkualitas.

5. Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuannya. SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut, sedangkan SDM

yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian yang dimiliki akan terus menerus dikembangkan dan diperkaya serta ditingkatkan, baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan, seminar/workshop dan lain-lain agar mampu merespon perkembangan kebutuhan pengawasan yang terus berkembang. Namun demikian, kondisi aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat saat ini, belum seluruhnya mengikuti diklat - diklat kepengawasan, sehingga menjadi faktor penghambat bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang profesional dan akuntabel.

6. Kebijakan Mutasi Pegawai

Salah satu faktor penghambat terwujudnya aparatur pengawasan yang kompeten, berintegritas dan disiplin yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik adalah kebijakan mutasi pegawai. Sebagaimana diketahui, bahwa dari sejumlah pegawai Inspektorat yang telah mengikuti Diklat Pengawasan dan memperoleh sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor, sebanyak 16 orang telah dimutasikan ke SKPD yang lain. Sedangkan kondisi yang ada saat ini, Pejabat Fungsional Auditor tinggal tersisa 4 orang. Mengingat sumber daya aparatur merupakan determinan bagi pencapaian tujuan organisasi, maka kebijakan mutasi pegawai yang kurang tepat, tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi upaya peningkatan kinerja layanan Inspektorat, termasuk bagi terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan.

b. Faktor Pendorong

1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi, kebijakan publik dan kepastian hukum. Arah yang diinginkan ini adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui kinerja yang nyata dan berkelanjutan.

2. SDM yang Kompeten dan Profesional

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang determinan bagi organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. Sedangkan SDM yang Profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah Kabupaten/ Kota dan pemerintahan desa/kelurahan. Kewenangan Inspektorat ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

4. Strategi Pengawasan yang tepat

Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditor, ruang lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat Kota Mojokerto adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian peran Inspektorat selaku pengemban amanah, mempunyai tanggung jawab yang besar bagi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi yang *applicable* kepada Walikota.

Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi

yang relevan dan bermanfaat kepada Walikota atau *Stakeholders* lainnya.

5. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.

Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

6. Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan senergitas pengawasan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN

Telaah terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri ini, khususnya Renstra Inspektorat Jendral dan Renstra Inspektorat Propinsi, terutama untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan bagi upaya Inspektorat Kota Mojokerto untuk meningkatkan kinerja layanannya. Hasil kajian ini juga sekaligus menjadi input yang penting bagi perumusan isu - isu strategis dan alternatif penyusunan kebijakan strategis dalam Renstra Inspektorat. Selain itu, telaah ini juga merupakan proses penting dalam

upaya harmonisasi dan sinergi antara Renstra Kementerian dengan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan. Hasil telaah Renstra Kementrian dan Renstra Inspektorat Propinsi serta faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi peningkatan layanan Inspektorat sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

TABEL - 9
PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	a. Meningkatnya kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan. b. Meningkatnya upaya pengendalian dan manajemen resiko	Belum optimalnya satgas SPIP	Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP	Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	Lemahnya penyusunan program anggaran	SDM yang kompeten dan Profesional
3	Terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	Belum memiliki SOP dan SPM yang memadai	Peran Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan
4	Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	Strategi pengawasan yang tepat
5	a. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten, berintegritas dan disiplin b. Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu	Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan	Perencanaan Pengawasan Koordinasi dan sinergitas pengawasan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	Belum berperan sebagai assurance quality	a. Sering berubahnya aturan b. belum selesainya SPI	a. Dukungan kebijakan Kemendagri b. Peran konsultasi
7	Terwujudnya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai	Sarana dan prasarana kurang memadai	Kurangnya pemeliharaan dan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru	Alokasi anggaran yang memadai

Sedangkan hasil analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan penanganan permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

TABEL - 10
PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota Lain	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan	Kurangnya pemeliharaan dan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru	a. Pemeliharaan secara berkala b. Alokasi anggaran yang memadai
2	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	Lemahnya penyusunan program anggaran	Alokasi anggaran yang memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota Lain	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	a. Belum optimalnya satgas SPIP b. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	a. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP b. Belum memiliki SOP dan SPM yang memadai	a. Dukungan kebijakan Inspektorat Propinsi b. Peran konsultasi
4	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan-	a. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	a. Perencanaan Pengawasan Koordinasi dan sinergitas pengawasan b. Strategi pengawasan yang tepat
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	Kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD terkait	Dukungan Komitmen Kepala Daerah terkait
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Hasil pemeriksaan belum optimal	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Aparatur pengawasan kurang kompeten	Dukungan lembaga pendukung pengawasan fungsional
7	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.	Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan	Adanya program Diklat/Bimtek pengawasan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana

struktur dan pola ruang terhadap pelayanan Inspektorat. Dari hasil telaah ini, Inspektorat diharapkan dapat menyusun rancangan program dan kegiatan beserta targetnya yang sesuai dengan kondisi RTRW Kota Mojokerto. Berikut disajikan tabel hasil telaahan struktur ruang wilayah Kota Mojokerto dan pengaruhnya terhadap kebutuhan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

TABEL - 11
PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN TELAAHAN RTRW BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Intensitas konsultasi dengan lembaga pengawasan fungsional kurang	a. Sarana transportasi kurang memadai b. Alokasi anggaran tidak memadai.	Koordinasi Kerjasama dengan BPKP Jawa Timur
2	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi -	Sarana dan prasarana teknologi informasi kurang memadai	a. Aparatur pengawasan kurang kompeten b. Alokasi anggaran tidak memadai. c. Belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.	a. Kota Mojokerto sebagai wilayah pengembangan smart city b. Ketersediaan jaringan dan teknologi informasi

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang lazim disingkat KLHS adalah proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan

hidup. Hasil identifikasi masalah pelayanan Inspektorat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis maupun faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

TABEL - 312
PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN ANALISIS
KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN
PENANGANANNYA

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan c. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.	Norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis belum tersusun	Dukungan komitmen Kepala Daerah

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Inspektorat Kota Mojokerto dalam beberapa tahun ke belakang, maka guna penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2014-2019 perlu rumusan isu-isu strategis patut mendapat perhatian khusus. Beberapa isu strategis atas pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Inspektorat sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya yang disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana baru;
2. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP yang disebabkan oleh kurang pengadaan peralatan baru;

3. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya yang disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dan sinergi perencanaan pengawasan;
4. Belum optimalnya penyusunan program anggaran yang menyebabkan terjadinya realisasi anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
5. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan disebabkan oleh belum tersusunnya standar, norma dan prosedur pemeriksaan;
6. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dari SKPD terkait;
7. Belum optimalnya satgas SPIP yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman seluruh Satgas terhadap SPI dan belum adanya SOP dan SPM yang memadai;
8. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit yang disebabkan oleh belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi persepsi aparatur terhadap tugas-tugas pengawasan;
9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu yang disebabkan oleh kebijakan mutasi pegawai, belum seluruh aparatur pengawasan mengikuti diklat pengawasan; dan
10. Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang yang disebabkan oleh sering berubahnya aturan dan belum selesainya penyusunan SPI.

Sebagai langkah berikutnya untuk menentukan isu - isu strategis pelayanan Inspektorat dengan menggunakan metode pembobotan terhadap isu-isu strategis pelayanan sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	TOTAL	100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala.

Setelah menetapkan skor atau bobot kriteria penentuan isu-isu strategis, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian atas kriteria yang ditetapkan berdasarkan skala masing-masing kriteria. Hasil penilaian terhadap isu - isu strategis berdasarkan skala kriteria yang ditetapkan tersaji sebagaimana tabel berikut.

NILAI SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	20	20	10	10	15	5	80
2	Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP	20	15	5	10	15	5	70
3	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	20	20	5	5	15	5	70
4	Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	20	20	5	10	10	5	70
5	Belum optimalnya Satgas SPIP	20	5	5	10	15	5	60
6	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	10	10	5	5	15	5	50
7	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	10	20	5	5	10	5	55
8	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	20	20	5	5	10	5	65
9	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	20	20	5	5	10	5	65
10	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/bangunan	20	20	5	10	15	5	75

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria.

Selanjutnya, dilakukan langkah penghitungan rata-rata skor/bobot untuk setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria, hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	80	13,33
2	Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP	70	11,66
3	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	70	11,66
4	Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	70	11,66
5	Belum optimalnya Satgas SPIP	60	10
6	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	50	8,33
7	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	55	9,16
8	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	65	10,83
9	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	65	10,83
10	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/bangunan	75	12,5

Berdasarkan analisa di atas, maka isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk segera mendapatkan penanganan adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan, salah satunya sangat mendesak adalah rehabilitasi gedung kantor Inspektorat yang kondisinya saat ini sudah mengalami kerusakan parah. Isu berikutnya yang juga merupakan prioritas utama adalah peningkatan kapasitas APIP, khususnya penambahan personil yang memiliki keahlian khusus di bidang teknik sipil. Isu - isu yang lain adalah peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan APIP, optimalisasi penyusunan program anggaran, dan terrealisasinya penyusunan *standard operating procedure* (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal bidang pengawasan yang sesuai dengan standard nilai, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melakukan tahapan penentuan isu -isu strategis, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi yang menjadi landasan pijak bagi keberhasilan implementasi perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Inspektorat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Sangatlah penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan operasional, maka Inspektorat diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (*visi, misi tujuan dan sasaran SKPD*) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (*indikator kinerja Daerah*). Perumusan strategi pada Renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*).

Langkah awal penggunaan metode SWOT adalah melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal sebagai upaya untuk mengenali kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikontrol (*controllable*) dan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dapat dikontrol (*uncontrollable*) guna mengetahui faktor peluang dan faktor yang mengancam kelangsungan organisasi. Selanjutnya dengan menggunakan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT, dimaksudkan

untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Bertitik tolak dari identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi Inspektorat Kota Mojokerto di atas, maka dapat dipetakan lingkungan internal maupun eksternal organisasi Inspektorat Kota Mojokerto sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Strength (Kekuatan)

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan;
3. Terbentuknya Satgas SPIP.
4. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan

b. Weakness (Kelemahan)

1. Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa
2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang memadai;
3. Terbatasnya alokasi anggaran.
4. Sarana dan prasarana penunjang belum memadai;
5. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja;
6. SOP dan SPM pengawasan belum memadai.

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (Peluang)

1. Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
3. Dukungan dari aparat pengawasan internal pemerintahan lainnya dan aparat pengawasan eksternal;
4. Meningkatnya upaya penegakan hukum.

b. Threats (Tantangan/Ancaman)

1. Tuntutan dari masyarakat;
2. Tuntutan dari pengambil kebijakan;
3. Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan;

4. Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi;
6. Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota.

Dalam bentuk tabel, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kota Mojokerto tersaji sebagai berikut :

TABEL - 3.5.1
KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto	1	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa.
2	Program Kerja Pengawasan Tahunan	2	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.
3	Terbentuknya Satgas SPIP	3	Terbatasnya alokasi anggaran.
4	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	4	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.
		5	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja.
		6.	SOP dan SPM belum memadai.
PELUANG		ANCAMAN	
1	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	1	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	2	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat
3	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.	3	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemerriksaan/pengawasan
4	Meningkatnya upaya penegakan hukum.	4	Tuntutan dari pengambil kebijakan.
		5.	Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi
		6.	Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota

Melalui proses pembobotan masing - masing faktor, dapat diketahui tingkat urgensi masing-masing faktor. Selanjutnya, dan skor analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal berdasarkan pengukuran bobot dan skor terlihat pada tabel berikut :

TABEL - 3.5.2
PENENTUAN BOBOT Matrik Urgensi Ali
(ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL)

No	Kekuatan dan Kelemahan	Faktor yang paling Urgen										Jml	Bobot
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
a	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto		a	a	d	a	a	a	a	a	a	8	16
b	Program Kerja Pengawasan Tahunan	a		b	d	b	b	g	h	b	b	5	10
c	Terbentuknya Satgas SPIP	a	c		c	e	c	c	c	c	c	7	14
d	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	d	d	d		d	d	d	d	d	d	9	18
e	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa	a	b	c	d		e	g	h	e	j	2	4
f	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.	a	b	c	d	e		g	h	f	f	2	4
g	Terbatasnya alokasi anggaran.	a	g	g	d	g	f		g	g	g	6	12
h	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.	a	b	h	d	h	h	g		h	h	5	10
i	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja.	a	b	i	d	e	f	g	h		i	2	4
j	SOP dan SPM belum memadai.	a	b	j	d	j	f	g	j	j		4	8
	Jumlah											50	100,00

**TABEL - 3.5.3
PENENTUAN BOBOT Matrik Urgensi ALE
(ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL)**

No.	Peluang dan Ancaman	Faktor yang paling Urgen										Jml	Bobot
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
a	Adanya peraturan perundang-undangan ttg penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.		a	a	d	e	a	g	h	a	j	4	9,09
b	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil KDH terpilih.	a		b	d	b	b	g	h	i	b	4	9,09
c	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	a	b		d	e	f	g	h	c	j	1	2,27
d	Meningkatnya upaya penegakan hukum	d	d	d		d	d	g	h	i	j	5	11,36
e	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah	e	b	e	d		f	g	h	i	e	3	6,82
f	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat	a	b	f	d	f		f	f	f	f	6	13,64
g	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	g	g	g	g	g	f		h	i	j	5	11,36
h	Tuntutan dari pengambil kebijakan	h	h	h	h	h	f	h		h	h	8	18,18
i	Belum terpadu sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan	a	i	c	i	i	f	i	h		i	5	11,36
j	Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pem. Pusat dan Pemkab/Kota	a	b	j	j	e	f	j	h	i		3	6,82
	Jumlah											44	100

Selanjutnya berdasarkan identifikasi di atas, maka ditentukan keterkaitan antara analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan memberikan bobot dan ratingnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**TABEL - 3.5.4
PENENTUAN SKOR DAN RATING ALI DAN ALE
PADA INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

No.	Analisis Lingkungan	Bobot	Rating	Score
1	2	3	4	$(5=3 \times 4) / 100$
	Analisis Lingkungan Internal (ALI)			
A.	KEKUATAN			
1.	Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto	16	4	0,64
2.	Program Kerja Pengawasan Tahunan	10	3	0,30
3.	Terbentuknya Satgas SPIP	14	4	0,56
4.	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	18	4	0,72
	Sub Jumlah	58		2,22
B.	KELEMAHAN			
1.	Belum adanya Pejabat Fungsional Pemeriksa.	4	3	0,12
2.	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.	4	3	0,12
3.	Terbatasnya alokasi anggaran.	12	3	0,36
4.	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.	10	3	0,30
5.	Kurangya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja.	4	2	0,08
6.	SOP dan SPM belum memadai.	8	4	0,32
	Sub Jumlah	42		1,30
	Jumlah	100		3,52

No	Analisis Lingkungan		Bobot	Rating	Score
1	2		3	4	(5=3x4)/100
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)					
A. PELUANG					
1.	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		9,09	4	0,36
2.	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih		9,09	4	0,36
3	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal		2,27	3	0,07
4.	Meningkatnya upaya penegakan hukum		11,36	3	0,34
Sub Jumlah			31,82		1,14
B. ANCAMAN					
1.	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.		6,82	3	0,20
2.	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat		13,64	3	0,41
3.	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemerriksaan/pengawasan		11,36	4	0,45
4.	Tuntutan dari pengambil kebijakan.		18,18	3	0,55
5.	Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi		11,36	3	0,34
6.	Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota		6,82	2	0,14
Sub Jumlah			68,18		2,09
Jumlah			100		3,23

Keterangan : Nilai Rating Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah :

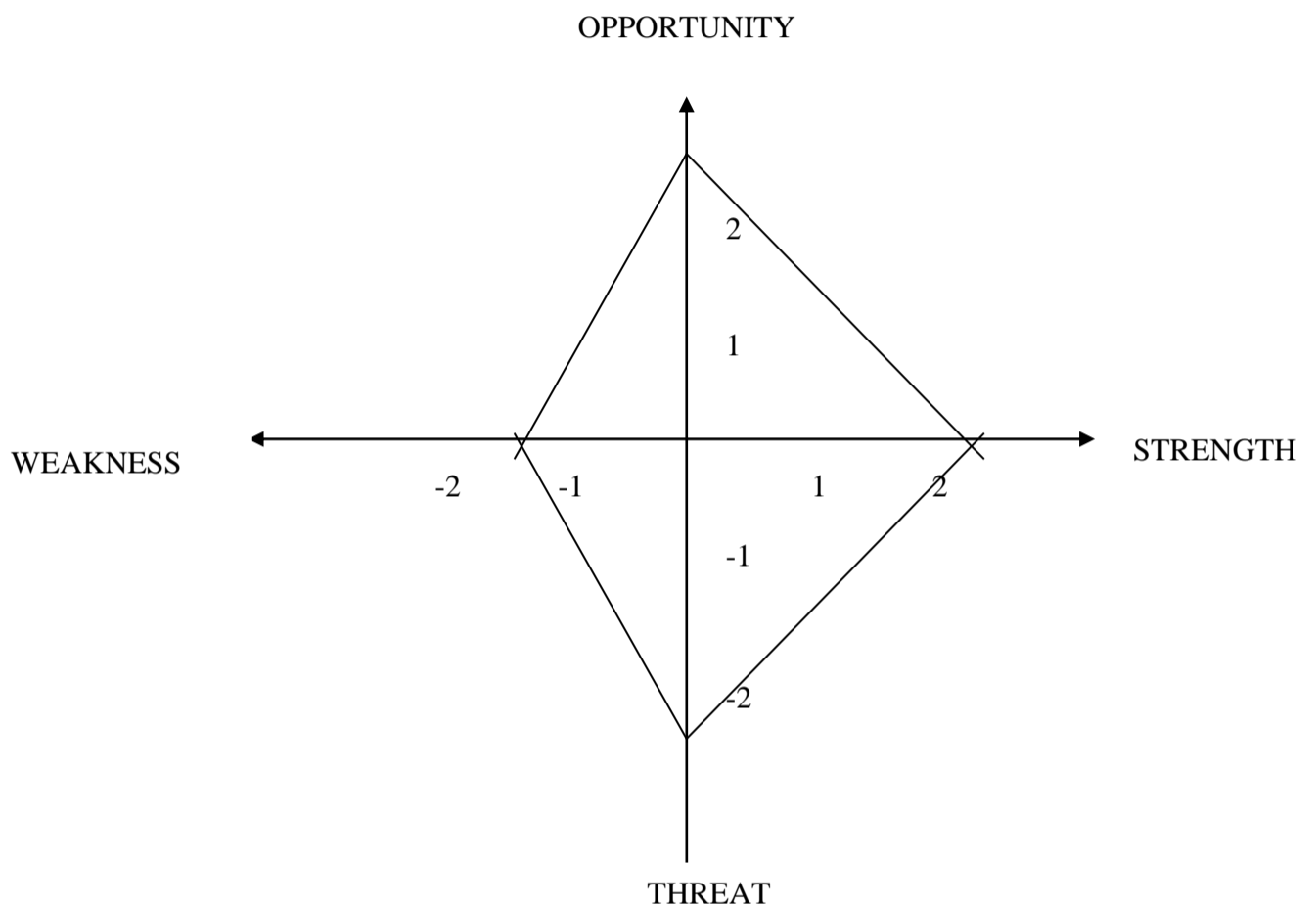
- Sangat Berpengaruh = 4
- Berpengaruh = 3
- Kurang Berpengaruh = 2
- Tidak Berpengaruh = 1

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :

✓ Kekuatan	=	2,22
✓ Kelemahan	=	1,30
✓ Peluang	=	1,14
✓ Ancaman	=	2,09

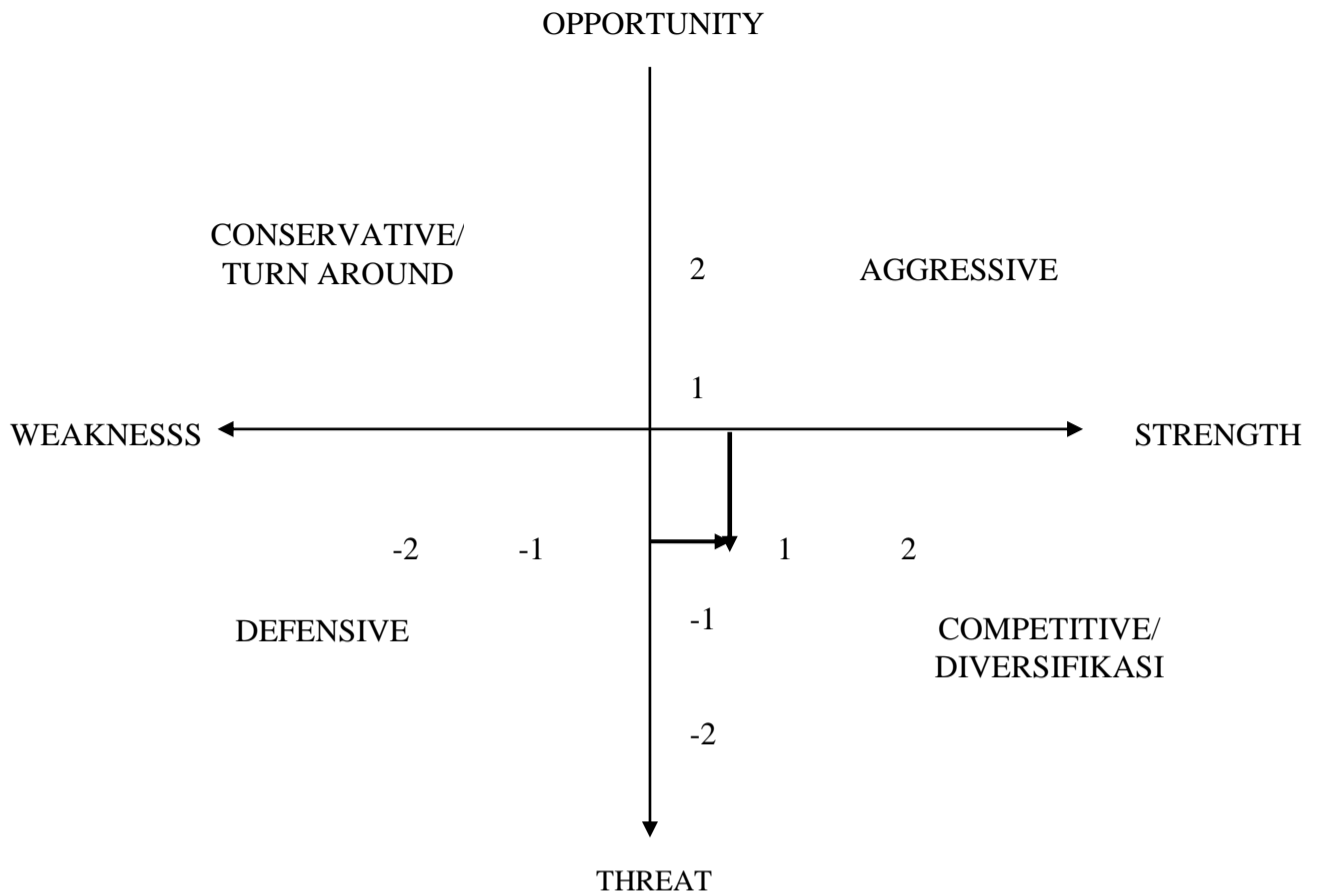
Nilai/skor yang dihasilkan pada masing-masing faktor ALI-ALE tersebut merepresentasikan titik-titik pada diagram ALI-ALE berikut :

GAMBAR - 3.5.6
NILAI SKOR PADA DIAGRAM ALI-ALE



Berdasarkan titik – titik tersebut dapat ditarik suatu vector *strength* – *weakness* yang bernilai positif = 0,92 sedangkan nilai dari vector *opportunity* – *threat* yang bernilai negatif = - 0,95.

Untuk mengetahui posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto dengan menggunakan hasil vector tersebut diatas, dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut :



Posisi tersebut menggambarkan bahwa strategi yang sesuai untuk Inspektorat Kota Mojokerto adalah strategi **Competitive/Diversifikasi**. Posisi ini mengandung makna bahwa organisasi harus lebih pro aktif melakukan perubahan secara kompetitif, karena kekuatan yang dimiliki tidak cukup dominan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Namun demikian, jika ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan baik akan menghasilkan peluang yang besar bagi eksistensi Inspektorat Kota Mojokerto.

Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal di atas, kiranya dapat ditetapkan strategi yang tepat sebagai faktor kunci keberhasilan ke dalam 4 (empat) strategi, tentunya dengan mempertimbangkan posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto yang berada pada posisi *competitive/diversifikasi*. Adapun strategi yang tepat sebagai faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang) :

1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan

- perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
 3. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.
 4. Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan dengan memanfaatkan peningkatan upaya penegakan hukum.
- b. Strategi ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat.
 2. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan;
 3. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;
 4. Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/ pengawasan.
- c. Strategi WO (Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang)
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 2. Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal;
 3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih;
 4. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
1. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan.

2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.
3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
4. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Berikut tabel analisis strategik dengan faktor SWOT Inspektorat Kota Mojokerto :

TABEL - 3.12
ANALISIS STRATEJIK DENGAN FAKTOR SWOT
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

		Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
		ALI	1	Perda Kota Mojokerto Nomor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto	1
		2	Program Kerja Pengawasan Tahunan	2	Kualitas sumber daya manusia kurang memadai.
		3	Terbentuknya Satgas SPIP	3	Terbatasnya alokasi anggaran.
ALE		4	Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan	4	Sarana dan prasarana penunjang belum memadai
				5	Kurangya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja
				6	SOP dan SPM belum memadai
Peluang (Opportunity)		Strategi S + O		Strategi W + O	
1	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	1	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	2	Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal

3	Dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.	3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
4	Meningkatnya upaya penegakan hukum.	4.	Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan dengan memanfaatkan peningkatan upaya penegakan hukum	4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum
5	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.				

Ancaman (Threat)		Strategi S + T		Strategi W + T	
1	Sering terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat	1	Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan
2	Meningkatnya tuntutan dari masyarakat	2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan	2	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan
3	Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;	3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal
4	Tuntutan dari pengambil kebijakan.	4.	Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/pengawasan	4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi
5	Belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi				
6	Belum adanya sinergitas program dan kegiatan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota				

Tahap terakhir dari proses analisis SWOT adalah menentukan faktor – faktor kunci keberhasilannya dengan mencermati keterkaitan strategi dengan visi, misi dan arah kebijakan. Untuk menentukan ranking, didasarkan atas nilai tertinggi dan hasil penjumlahan skor keterkaitannya serta mempertimbangkan posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto, yang berada pada kuadran Competitive/Diversifikasi.

Dalam konteks ini, Lembaga Administrasi Negara telah menetapkan acuan untuk menetapkan faktor kunci keberhasilan, paling tidak 7 (tujuh) strategi. Berdasarkan keterkaitan tersebut ditentukan faktor - faktor kunci keberhasilan Inspektorat sebagai berikut :

TABEL - 3.13
PENENTUAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

No.	STRATEGI	Keterkaitan Dengan			Jumlah	Urutan CSF
		Visi	Misi	Arah		
STRATEGI S + O						
1.	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4	4	4	12	I
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	4	4	4	12	II
3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	3	3	4	10	VII
4.	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4	2	2	8	
STRATEGI S + T						
1.	Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat	4	4	3	11	IV
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan	4	4	3	11	V
3.	Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;	4	4	2	10	VIII
4.	Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/ pengawasan	3	3	2	8	

STRATEGI W + O						
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	2	3	4	9	
2	Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal	2	2	4	8	
3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	3	3	3	9	
4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum	3	3	4	10	IX
STRATEGI W + T						
1	Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan	3	4	3	10	X
2	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	3	4	4	10	XI
3	Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal	4	4	3	11	VI
4	Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi	4	4	4	12	III

Keterangan :

- Paling terkait = 4
- Terkait = 3
- Kurang terkait = 2
- Tidak terkait = 1

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi kunci untuk Inspektorat Kota Mojokerto sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
3. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.
4. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Teknis Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan.
6. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.
7. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
8. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.
9. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum.
10. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan.
11. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.